

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

Dasar pertimbangan yang diberikan oleh Presiden terhadap terpidana Narkotika yaitu Schapelle Leigh Corby memang tidak berdasarkan Undang-Undang tentang Grasi yang berlaku ketika itu, akan tetapi mendasarkan pada faktor kemanusiaan yang bersifat umum saja tanpa ada penjelasan yang khusus terkait alasan tersebut. Faktor kemanusiaan ini yang menjadi dasar pertimbangan Presiden dalam memberikan Grasi tidaklah salah karena merupakan kewenangan Presiden dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Akan tetapi jika dinilai dari aspek masyarakat akan dianggap telah mencederai rasa keadilan dalam masyarakat, sebab Presiden memberikan Grasi kepada Corby berdasarkan alasan kemanusiaan saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan tersebut. Faktor Kemanusiaan tersebut tidak bisa diterima masyarakat yang beranggapan bahwa terpidana Narkotika tidaklah pantas untuk menerima Grasi karena kasus yang dilakukan Corby adalah tindak pidana Narkotika yaitu kepemilikan Ganja seberat 4,2 Kg, kasus Narkotika merupakan *extraordinary crime*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis, dengan sangat rendah hati penulis memberikan saran berupa:

1. Perlu adanya koordinasi dalam pertimbangan pemberian Grasi pada khususnya antara Presiden dan Mahkamah Agung serta Menteri Hukum dan HAM agar sesuai dengan rasa keadilan yang dijunjung tinggi masyarakat.
2. Perlu adanya peraturan yang secara jelas dan khusus yang selain mengatur tentang pertimbangan dari Presiden dan Mahkamah Agung mengenai dasar pertimbangan pemberian Grasi, juga mengatur kriteria, dan batasan khususnya terhadap terpidana Narkotika, agar ada kesesuaian antara Undang-Undang dengan apa yang dilakukan pemerintah. Pendapat para ahli dapat juga dijadikan dasar pertimbangan sementara sebelum nantinya akan dibuat Undang-Undang yang mengatur.
3. Perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk memberikan pandangan atau pendapat mengenai pantasnya terpidana Narkotika untuk menerima Grasi yang dapat diwakilkan oleh kalangan akademik, tokoh adat setempat, dan masyarakat. Hal ini agar pemberian Grasi dapat dilakukan secara adil dan bijaksana baik berdasarkan Undang-Undang, pertimbangan pemerintah dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Al Wisnubroto, 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1998, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Andi Sofyan, 2013, *HUKUM ACARA PIDANA Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- J.C.T Simorangkir, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, 1987, *Ringkasan Sari Hukum Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Teguh Praseto, 2012, *HUKUM PIDANA*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

- Triana Putrie Vinansari, 2013, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Di Indonesia*, jurnal hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Website

- <http://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden>, tanggal akses 22 Maret 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Schapelle_Corby, tanggal akses 22 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd3fb4011a22/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby>, tanggal akses 22 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd3fb4011a22/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby>, tanggal akses 24 Maret 2014.

<http://hukum.kompasiana.com/2014/02/09/reaksi-terhadap-bebasnya-corby-remisi-grasi-dan-pembebasan-persyarat-dalam-sistem-pemidanaan-perlukah-633761.html>, tanggal akses 22 Maret 2014.

J.E. Sahetapy,
<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, tanggal akses 20 januari 2015.

Satochid Kartanegara,
<http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, tanggal akses 20 januari 2015.

<http://ryochinaja.blogspot.com/2011/10/pengertian-grasi-amnesti-abolisi-dan.html>, tanggal akses 21 April 2015.

<http://news.detik.com/read/2012/05/31/055243/1928950/10/2/7-ahli-hukum-pertanyakan-grasi-corby>, diakses tanggal 22 April 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permayarakatan.

